

Utopia konsep kepemimpinan pasca reformasi Embrio despotisme dan dinasti politik

by Siti Marwiyah

Submission date: 04-Sep-2023 01:28PM (UTC-0700)

Submission ID: 2157754343

File name: mpinan_pasca_reformasi_Embrio_despotisme_dan_dinasti_politik.pdf (158.16K)

Word count: 3540

Character count: 23065



7
Utopia Konsep Kepemimpinan Pasca Reformasi: Embrio Despotisme dan Dinasti Politik

Siti Marwiyah, Sandi Ari Wicaksona*, Vira Nur Wahyuni, Mamlu'atul Kharimah, Yusril Tiantoro
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga

Diterima: Mei 2022; Disetujui: Mei 2022; Dipublish: Mei 2022

Abstrak

Tulisan ini menyoroti ketimpangan teoritis dan praktis literatur kepemimpinan. Literatur kepemimpinan bersifat statis dan eksklusif pada bidang manajemen. Kepemimpinan dilihat sebagai kemampuan untuk mengorganisasi suatu lembaga atau perusahaan untuk mencapai tujuan bersama atau target yang telah ditetapkan. Sedangkan, pemberitaan di media sarat dengan penangkapan kepala daerah yang mana juga seorang pemimpin akibat penyalahgunaan kekuasaan. Tulisan ini hendak mengkaji kepemimpinan yang gagal yang mana banyak kepala daerah terlibat pada masalah suap dan korupsi. Adapun hasil penelitian ini adalah pemimpin yang terpilih tidak serta merta dapat menunjukkan kemampuan sebagai pemimpin yang ideal. Ini menurut Hobbes disebabkan oleh kondisi alamiah manusia yang konfliktual sehingga mereka terdorong untuk mengikuti hasrat sebagai penguasa. Dampaknya adalah kecenderungan birokrasi kemudian dijalankan secara despotisme dan melanggengkan praktik dinasti politik di daerah. In yang tidak sesuai dengan semangat reformasi yang mana menuntut adanya supremasi hukum dan pemerintahan yang lebih adil untuk rakyat lebih banyak.

Kata Kunci: kepemimpinan, reformasi, despotisme, dinasti politik, hobbes

Abstract

This paper examines researching and practical leadership literature. Leadership literature is static and exclusive in the field of management. Leadership is seen as the ability to organize an institution or company to achieve common goals or targets that have been set. While the news in the media is full of arrests of regional heads who are also leaders due to power abuse. This paper aims to examine if leadership failed of which regional heads were involved in bribery and corruption issues. The results of this study are that the elected leader does not necessarily demonstrate the ability as an ideal leader. This, according to Hobbes, is caused by the conflictual conditions of human nature so that they are compelled to follow their desires as rulers. The impact is that future bureaucracy is then run in despotism and political dynasties which is not in accordance with the spirit of reform which demands the rule of law and a more just government for more people.

Keywords: leadership, despotism, political dynasty, reformation, hobbes

How to cite: Marwiyah, et al. 2022. Utopia Konsep Kepemimpinan Pasca Reformasi: Embrio Despotisme dan Dinasti Politik. Jurnal Sosial Politik Integratif, hlm. 263-287. Dapat diakses di <http://jisip.org/index.php/jsp/article/view/84>

*Corresponding author:

email: shandyariwicaksona@gmail.com

PENDAHULUAN

Belakangan ini, negara Indonesia memiliki sejumlah figur pemimpin yang menarik perhatian publik. Di antara pemimpin tersebut mendapatkan perhatian disebabkan gaya kepemimpinannya yang membuktikan kinerja dan menguasai masalah dengan baik. Beberapa pemimpin tersebut antara lain Ridwan Kamil (Mantan Walikota Bandung, sekarang Gubernur Provinsi Jawa Barat), Bu Rismaharini (Mantan Walikota Surabaya, sekarang Menteri Sosial Kabinet Joko Widodo Periode Ke-2), Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), dan banyak lainnya yang mendapatkan banyak eksposur baik dari media nasional maupun sosial media.

Pemimpin tersebut dapat dikenali dari posisi yang dimiliki seperti walikota, bupati, ketua umum partai politik, menteri hingga presiden. Umumnya pemimpin sangat mudah dikenali (5 Smart Ways to Identify Leaders in Your Organization, n.d.) dari jabatan yang diperoleh, amanat yang dijalankan, tanggung jawab yang diemban dan peran yang dijalankan. Pemimpin dengan demikian bisa dikenali dari: jabatan, amanah, tanggung jawab (Why Is Responsibility Important in Leadership?, 2017) dan peran (Positive Leadership: Roles of the Leader, n.d.). Ini menjadi indikator penting mengenali siapa yang menjadi pemimpin dan siapa yang bukan pemimpin (Tamim, 2019).

Tidak semua seseorang yang memiliki jabatan disebut pemimpin (Arnander, 2013). Pemimpin bisa

diartikan dengan kemampuan tertentu yang dimiliki (Gleeson, 2016). Kemampuan ini bisa berupa kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu, mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, kelompok, organisasi maupun perusahaan ('The Five Leadership Positions', 2017). Pemimpin biasanya memiliki hubungan erat dengan organisasi dimana ia berada. Seorang pemimpin juga dapat ditandai dengan perannya sebagai pengambil keputusan (Larina Kase, 2010). Kemampuan ini menjadi salah satu atribut yang membedakan pemimpin dengan bukan pemimpin.

Sutrisno dalam (Basuki & Sari, 2022) menambahkan salah satu atribut pemimpin yakni dapat memotivasi orang lain. Selain itu, ia menambahkan ciri pemimpin lainnya dengan tindakan yang dapat memimpin, membimbing, mempengaruhi orang lain (Basuki & Sari, 2022). Pemimpin juga merupakan aspek yang sangat urgen dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi (Leadership Traits for Organizational Success, n.d.), karena kepemimpinan memiliki keterkaitan terhadap perilaku seorang pemimpin dalam mempengaruhi para pegawai atau karyawannya, sehingga para pegawai mau bekerja sama untuk mewujudkan suatu tujuan organisasi. Selain itu, kepemimpinan akan berjalan dengan baik jika pemimpin dan karyawan memiliki kerja sama (Successful Teamwork, n.d.).

Persoalan utama dewasa ini sebagian besar pemimpin tidak menunjukkan etika. Mereka jelas

menunjukkan sikap tidak amanah, tidak memainkan peran sebagai layaknya pemimpin, dan sering kali tidak bertanggung jawab. Pemimpin bahkan sering menggunakan posisinya untuk mendapatkan keuntungan, memperkaya diri, mengintimidasi, memaksa, bersikap otoriter, memperpanjang jabatan, memutasi, memberhentikan bawahannya, dan banyak lainnya. Ini banyak ditunjukkan di berbagai media baik cetak maupun sosial sebagai tontonan publik dan konsumsi publik.

Konsep teoritis kepemimpinan dianggap gagal untuk menjelaskan fenomena ini. Teori *the great man* tidak dapat menjelaskan apa yang membentuk seseorang sebagai pemimpin yang besar. Teori ini hanya meyakini bahwa pemimpin itu lahir begitu saja dan kondisi yang membutuhkan pemimpin memuluskan seseorang menjadi seorang presiden yang berpengaruh baik secara nasional maupun global. Konsep ini juga tidak bisa bertahan lama karena sebagian besar individu yang lahir pada akhirnya menjadi pemimpin yang otoriter; bahkan dalam praktiknya mereka ingin menjadi presiden selamanya (Ummatin et al., 2022).

Pemimpin yang didekati dengan teori ini pada akhirnya berkeembang sebagai diktator dan otoriter. Ini mengikuti siklus evolusi kepribadian pemimpin.

Siklus kepribadian pemimpin dapat dijelaskan sebagai berikut. Pemimpin yang lahir dan dipilih dari suatu kudeta yang sukses terhadap pemerintahan yang dianggap tidak memihak rakyat, biasanya akan tumbuh sebagai seorang

diktator. Pemimpin yang lahir dari negara yang demokratis biasanya akan menjadi pemimpin yang hanya menguntungkan kelompok tertentu atau kelompok elit yang dekat dengan kekuasaan. Pemimpin yang lahir dari suatu monarki dan dinasti, selalu menampilkan kecakapan berorganisasi yang minim (Cohen, 2016).

Sedangkan teori kepemimpinan transaksional, dan teori kepemimpinan lainnya dalam disiplin ilmu psikologi dan manajemen, juga gagal menjelaskan secara spesifik penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Kepemimpinan transaksional banyak bertahan pada situasi yang mana kompetisi dibutuhkan. Sedangkan dalam tata kelola pemerintahan, saat seseorang menjadi presiden maka keputusannya bersifat monopolistik dimana tidak ada pesaing terhadap supremasi dari pemerintah eksekutif. Maka tidak heran, teori ini banyak berkembang di disiplin ilmu ekonomi, psikologi perusahaan, manajemen, dan organisasi bisnis.

Melihat penyimpangan yang terjadi, maka pemimpin tidak lain hanyalah suatu atribut jabatan yang dipegang oleh seseorang yang tidak memiliki kualifikasi maupun kompetensi yang dibutuhkan demi menjalankan kepentingan-kepentingan individualis. Hal yang kemudian menjadi kesenjangan teoritis dan praktis. Meskipun tidak amanah, tidak memiliki prestasi, tidak memiliki reputasi; pemimpin yang demikian tetap terpilih dan menjalankan kekuasaan.

Lewat tulisan ini maka ada pertanyaan yang ingin dijawab dan

dijelaskan, yakni apa yang mengakibatkan pergeseran makna pemimpin dari narasi positif ke narasi negatif yang membuat kita perlu untuk membangun definisi dan makna baru kepemimpinan saat ini. Apa yang menyebabkan seseorang yang tidak memiliki etika pemimpin justru dipilih sebagai pemimpin. Lalu bagaimana masa depan organisasi yang diketuai oleh pemimpin yang demikian.

² METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau disebut juga penelitian kepustakaan. Metode ini bersumber dari membaca, mengkaji, dan membandingkan literatur seperti buku kepemimpinan dan kekuasaan antara ide dan kenyataan, jurnal, dan artikel lainnya. Adapun data sekunder digunakan ialah hasil penelitian yang mengangkat topik “kepemimpinan²⁰”, berita yang berisi tentang korupsi sebagian besar dilakukan oleh orang-orang yang memegang jabatan, tanggung jawab, diberi amanah, kewajiban dan sebagai teladan kepemimpinan yang justru tidak mencerminkan sosok pemimpin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemimpin yang “Bukan Pemimpin”

Pemimpin adalah topik yang sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam. Topik ini penuh dengan berbagai definisi utopis tentang kepemimpinan. Kepemimpinan mudah dikenali dari jabatan yang dimiliki, tugas pokok dan

fungsi yang secara merit melekat pada jabatan/posisi yang sedang dijalankan, tanggung jawab, figur sosial, amanah dan banyak lainnya. Akan tetapi kita banyak belajar sehingga sampai pada kesimpulan bahwa banyak pemimpin tidak menjalankan perannya secara ideal. Sebaliknya banyak pemimpin yang selama menjabat melakukan penyimpangan dan korupsi.

Bulan lalu, tepatnya Mei 2022, KPK berhasil menangkap Bupati Bogor¹⁶ Ade Yasin beserta sejumlah pihak (Bupati Bogor Ade Yasin Dan Sejumlah Pihak Ditangkap KPK Untuk Kasus Suap). Bupati Bogor ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan di wilayah Jawa. Bupati Bogor tertangkap memberikan sejumlah uang kepada pemeriksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) agar dapat merevisi laporan keuangan pemerintah daerah Bogor menjadi Wajib Tanpa Pengecualian (WTP) (CNN Indonesia, 2022).

Pada 6 Januari 2022, KPK¹⁴ mengamankan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dalam OTT di Kota Bekasi, Jawa Barat. 13 Januari 2022, KPK menangkap Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud dalam OTT pada Rabu, KPK menangkap Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin dalam OTT pada Selasa malam. KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di Kabupaten Probolinggo pada Senin, KPK menangkap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin. Hasan merupakan Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Nasdem. Mereka diduga terlibat dalam kasus suap terkait jual beli jabatan di Pemerintah

Kabupaten Probolinggo pada 2019 (Media, 2022; Media, 2021).

Pada 21 September 2021, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur. KPK menangkap Andi bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kolaka Timur, Anzarullah. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan pada Maret hingga Agustus 2021, Andi dan Anzarullah menyusun proposal dana hibah BNPB berupa dana rehabilitasi dan rekonstruksi, serta dana siap pakai. Proposal itu lantas diajukan ke BNPB Pusat. Kabupaten Kolaka Timur memperoleh dana hibah Rp 26,9 miliar dan dana siap pakai sebanyak Rp 12,1 miliar.

KPK menetapkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada 3 September 2021 lalu. KPK menetapkan Budhi bersama Kedy Afandi yang berasal dari pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara, Jawa Tengah 2017-2018. Budhi ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menerima fee sebesar Rp2,1 miliar atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara.

Novi Rahman terkena OTT KPK pada 10 Mei 2021. Ia diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi terkait pengisian jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menuturkan nominal uang yang diserahkan oleh masing-masing camat berkisar antara Rp 10-15 juta hingga paling tinggi Rp150 juta.

Nurdin yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 28 Februari 2021 lalu. Nurdin diduga terlibat kasus suap terkait dengan pengadaan barang, jasa dan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan. Ia diduga menerima uang Rp2 miliar dari kontraktor untuk memuluskan sejumlah proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan. Nurdin yang merupakan kader PDI Perjuangan itu sempat mendapatkan penghargaan antikorupsi Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) pada tahun 2017.

Sejumlah kasus di atas menunjukkan bahwa orang yang ditunjuk sebagai pemimpin dari proses demokrasi paling demokratis pun tidak dapat disebut sebagai pemimpin. Menggunakan konseptualisasi Sukirno (2014) maka individu di atas sama sekali tidak menunjukkan karakter maupun atribut pemimpin yang amanah, penuh tanggung jawab, dan menjalankan kewajiban; selain memiliki jabatan. Hal ini ditunjukkan dari perilaku yang tidak bertanggung jawab sebab tindakan yang menguntungkan diri sendiri. Korupsi membuat pemimpin kemudian tidak layak disebut pemimpin. Dengan demikian, jabatan gugur sebagai salah satu atribut untuk mengenali pemimpin.

Faktor dari "Pemimpin" ke "Bukan Pemimpin"

Pemimpin dalam menentukan model gaya kepemimpinannya harus mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Pemimpin-pemimpin yang berhasil adalah mereka yang dapat menyesuaikan perilaku dirinya sesuai

dengan tuntutan lingkungannya. Kepemimpinan yang efektif atau tidak efektif itu sangat tergantung akan gaya perilaku yang disesuaikan dengan situasi tertentu (Mulyono, 2018).

Selain jabatan, salah satu faktor yang membuat seorang yang memiliki jabatan seperti bupati tidak dapat disebut sebagai pemimpin ketika ia melakukan pelanggaran. Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban masyarakat. Antara lain:

The Nature of Human Being

Manusia pada intinya adalah manusia yang korup. Korup mengandung arti bahwa manusia tidak sempurna. Kekurangan selalu melekat pada setiap individu. Kekurangan ini bisa meliputi kekurangan dalam menyadari eksistensi diri, kekurangan dalam bersyukur, kekurangan selalu berkompetisi dalam materi (materialistik), selalu berkonflik antara manusia satu dan manusia lainnya dan selalu memiliki dorongan untuk kepentingan pribadi daripada kepentingan umum (pragmatis).

Salah satu filsuf yang menekankan bahwa manusia adalah makhluk yang korup yang selalu berkompetisi satu sama lain adalah Thomas Hobbes. Pendekatan Hobbes dalam menilai dan menyimpulkan kecenderungan ini disebut dengan pendekatan materialistik. Pendekatan materialistik menyatakan bahwa perilaku manusia selalu ditentukan oleh kekuasaan dan kepentingan. Manusia selalu memiliki dorongan besar untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh semaksimal

mungkin. Manusia suka ketika ia memegang seluruh kendali (pengaruh) atas manusia yang lainnya; ini membuat seseorang merasa nyaman. Pendekatan materialistik juga dipahami bahwa materi adalah segala-galanya. Kepemilikan materi menjadi tujuan akhir dari manusia ini hidup; menurut Hobbes tidak ada kehidupan lain selain kehidupan di dunia. Dengan kata lain tidak ada surga atau neraka yang menjadikan selain materi tidak lagi menjadi penting. Maka itu pendekatan ini juga disebut dengan embrio dari "ateisme"; tidak mengenal tuhan tidak mengenal tujuan akhir selain dunia.

Ini dapat digunakan untuk menjelaskan kecenderungan dari pemimpin yang melakukan pelanggaran terhadap janji jabatan atau sumpah jabatan. Persaingan akan kekuasaan dan pengaruh, mendorong orang memiliki standar sendiri dalam hidupnya di atas standar moral dan etika. Standar moral dan etika akhirnya dikalahkan oleh hasrat ingin berkuasa, ingin mendapat nama baik, gaya hidup yang mewah dan serba nyaman. Akhirnya, sikap ini mendorong mereka untuk berlomba menumpuk materi, kekayaan, kejayaan, aset, uang, dan banyak lainnya. Dengan demikian, mereka melupakan sumpah jabatan, amanat yang seharusnya dijaga, tanggung jawab hanyalah suatu atribut dari jabatan bukan menjadi kewajiban yang diemban dan dijalankan dengan baik yang mana hajat hidup orang banyak dipertaruhkan.

Banyak teori yang bernuansa indah menyatakan bahwa pemimpin adalah sosok yang dapat menggunakan dan memberdayakan seluruh aset dalam

organisasi dengan maksimal dengan tujuan akhir yang telah ditetapkan. Berita belakangan ini tentang operasi tangkap tangan membangun kesimpulan bahwa semakin lebar kesenjangan antara teori dan praktik dari konsep kepemimpinan itu sendiri. Karena kesenjangan ini semakin lebar, lahir kesimpulan bahwa konsep kepemimpinan dalam berbagai disiplin ilmu yang berkembang lebih bernuansa "utopis" daripada "riil". Inilah yang tidak pernah diangkat dalam berbagai tulisan ilmiah tentang kepemimpinan dan kelemahannya.

Masa Depan Birokrasi: Despotisme dan Dinasti Politik

Hal menarik lainnya dari pemimpin yang menjabat dan tidak memiliki karakter "kepemimpinan ideal" adalah masa depan birokrasi yang tidak pasti. Birokrasi meskipun terdiri atas orang-orang yang bisa memilih siapa yang menjadi pemimpinnya, tidak dapat mengendalikan suara yang diberikan warga agar memilih pemimpin yang baik. Ini disebabkan terdapat peluang lebih besar seorang pemimpin yang baik bisa menjadi pemimpin yang tidak baik. Peluang ini bisa diketahui ketika seorang individu itu mulai memimpin birokrasi. Ibaratnya, kepribadian individu tidak akan diketahui pada saat pertama kali bertemu; tetapi dapat diketahui ketika sudah lama dikenal. Kealpaan warga dalam memilih pemimpin menyumbang sebagian besar kelahiran pemimpin yang bukan pemimpin. Ini disebabkan praktik politik uang masih menjadi faktor yang disukai oleh warga utamanya oleh

warga miskin yang menurut mereka uang adalah jalan pintas dan jangka pendek terhadap kesukaran hidup yang dialami. Ini kemudian selaras dengan tesis Hobbes yang berbunyi "perilaku manusia ditentukan oleh materi" dan "akumulasi materi" sehingga lain-lain seperti moral dan etika tidak lagi menjadi penting dan signifikan.

Kembali lagi ke birokrasi; birokrasi layaknya seperti ekor, ia selalu mengikuti arah gerak "kepalanya". Jika kepala memiliki kecenderungan seperti yang digambarkan oleh Hobbes, maka birokrasi akan menjadi statis, tidak dinamis, dan intimidasi menjadi "engine" birokrasi itu sendiri. Saat intimidasi menjadi "engine" dalam menjalankan birokrasi, yang terjadi adalah birokrasi akan bergerak demi kepentingan "kepalanya". Ini adalah sinyal buruk pemerintahan yang tidak ideal dan menuju pemerintahan yang "despotis". Despotisme adalah bentuk pemerintahan dengan satu penguasa, baik individual maupun oligarki, yang berkuasa dengan kekuatan politik absolut. Despotisme dapat berarti tiran, atau absolutisme; atau diktatorisme. Ini adalah jenis pemerintahan yang tidak demokratis, intoleran, intimidatif, dan selalu berusaha untuk melanggengkan kekuasaan.

Selain despotisme, pemerintahan dengan pemimpin yang tidak memiliki karakter pemimpin ideal, akan pelan-pelan¹⁰ membangun "dinasti politik". Dinasti politik adalah kekuasaan yang secara turun temurun dilakukan dalam kelompok keluarga yang masih terikat dengan hubungan darah tujuannya untuk mendapatkan

atau mempertahankan kekuasaan. Indonesia saat ini secara empiris pelan-pelan membangun dinasti politik baik di daerah maupun di pusat. Namun, observasi dari dinamika kepala daerah di Indonesia, besar peluang membangun dinasti politik di daerah-daerah karena jauh dari pengawasan pemerintah pusat, rakyat diperintah dengan ketakutan dan ancaman sehingga rakyat berpikir "lebih baik menurut daripada kena masalah". Rakyat akhirnya dijajah dan dikoloni oleh bangsa sendiri. Dinasti politik jika kelahirannya tidak dicegah maka akan menjadikan pemerintahan kerajaan kecil di setiap daerah. Ini merupakan sinyal buruk dan kemunduran demokrasi yang katastropis.

Dinasti politik menjadi polemik yang banyak akademisi kritik. Salah satu contoh dinasti politik yang kental menjadi pembahasan adalah "bangunan dinasti politik Ratu Atut, bekas Gubernur Banten".

KESIMPULAN

Literatur tentang kepemimpinan sarat dengan konsep yang meletakkan kepemimpinan dengan utopia. Kepemimpinan dalam berbagai tulisan ilmiah tidak mencerminkan makna praktis dan berkuat pada teoritis. Ini mengakibatkan perkembangan tentang makna kepemimpinan menemui jalan buntu.

Kepemimpinan diibaratkan dengan sosok pribadi dan individu dengan berbagai keunggulan mulai dari jabatan lebih tinggi secara struktural, amanah

dalam sumpah jabatan, tanggung jawab yang diemban, putusan strategis yang dibuat, dan banyak lainnya. Akan tetapi, hasil penelitian secara ilmiah masih sedikit yang mengungkap tentang pemimpin yang tidak berhasil menjadi pemimpin yang baik. Kegagalan pemimpin menjadi pemimpin yang ideal disebabkan oleh banyak faktor, secara empiris pemimpin yang sebagian besar adalah kepala daerah justru melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum. Tindakan merugikan ini bisa termasuk golongan tindakan korupsi, tindakan mementingkan diri sendiri, menyalahgunakan kekuasaan, dan memelihara kekuasaan dengan segala cara. Salah satu dampak yang terasa adalah birokrasi sebagai agen penyedia layanan publik bersifat statis, top down, kaku, dan tidak bisa berkompromi dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Birokrasi kemudian berkembang ke arah melayani kepentingan penguasa sehingga secara tidak langsung menyumbang dan menyuburkan praktik pemerintahan yang despotis dan dinasti politik. Dua hal ini adalah fenomena yang nantinya daripada mempromosikan demokrasi, justru menggerogoti kemajuan demokrasi yang dikobarkan pasca reformasi. Reformasi tahun 1999 menyuarakan tuntutan rakyat mana terdapat tuntutan adanya transparansi hukum, supremasi hukum dan pemerintahan yang demokratis. Salah satu luarannya adalah desentralisasi. Di balik semangat untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, desentralisasi justru jadi ladang subur

kelahiran pemimpin yang despotis dan berdasarkan dinasti politik.

eret-kepala-daerah-terjaring-ott-kpk-sepanjang-2021

DAFTAR PUSTAKA

- 5 Smart Ways to Identify Leaders in your Organization. (n.d.). Retrieved 20 June 2022, from https://www.yoh.com/blog/smart-ways-to-identify-leaders-in-your-organization?hs_amp=true
- Arnander, F. (2013). We are all leaders: Leadership is not a position, it's a mindset. Capstone.
- Basuki, R. B., & Sari, R. P. (2022). Pengaruh kepemimpinan, disiplin kerja dan kompensasi terhadap kinerja karyawan non medis rsia yk madira palembang. *Jurnal Ecoment Global: Kajian Bisnis dan Manajemen*, 6(2). <https://doi.org/10.35908/jeg.v6i2.351>
- Bupati Bogor Ade Yasin Dan Sejumlah Pihak Ditangkap KPK Untuk Kasus Suap. *www.youtube.com*, <https://www.youtube.com/watch?v=KFpx64hp4Xo>. Accessed 21 June 2022.
- Indonesia, C. N. N. "Bupati Bogor Ade Yasin Ditangkap KPK." *CNN Indonesia*, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220427100022-12-790259/bupati-bogor-ade-yasin-ditangkap-kpk>.
- Indonesia, C. N. N. (n.d.). *Deret kepala daerah terjaring ott kpk sepanjang 2021*. nasional. Retrieved June 21, 2022, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211017125059-12-708868/d>
- Nasikhatul Ummatin, B., Marwiyah, S., & Mutmainah, I. (2022). Analisis Gaya Kepemimpinan Soekarno sebagai Presiden Indonesia Menggunakan Pendekatan The Great-Man Theory. *Jurnal Sosial Politik Integratif*, 2(4), 253-262. Diambil dari <http://jisip.org/index.php/jsp/article/view/76>
- Gleeson, B. (2016). 10 unique perspectives on what makes a great leader. *Forbes*. <https://www.forbes.com/sites/brentgleeson/2016/11/09/10-unique-perspectives-on-what-makes-a-great-leader/>
- Media, K. C. (2022, January 6). *Ott di awal tahun, wali kota bekasi rahmat effendi kepala daerah pertama yang ditangkap kpk halaman all*. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/06/09154441/ott-di-awal-tahun-wali-kota-bekasi-rahmat-effendi-kepala-daerah-pertama-yang>
- Media, K. C. (2021, August 30). *Kronologi ott terhadap bupati probolinggo dan suaminya terkait jual beli jabatan halaman all*. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/31/05561831/kronologi-ott-terhadap-bupati-probolinggo-dan-suaminya-terkait-jual-beli>
- Mulyono, H. (2018). Kepemimpinan (Leadership) berbasis karakter dalam peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(1), 290-297. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v3i>

1.93

portant

Larina Kase, P. (2010). Great Leaders are Great Decision-Makers. 2010 Volume 13 Issue 4, 4. <https://gbr.pepperdine.edu/2010/10/great-leaders-are-great-decision-makers/>

Leadership traits for organizational success. (n.d.). Retrieved 20 June 2022, from <https://ligsuniversity.com/blog/leadership-traits-for-organizational-success>

Positive leadership: Roles of the leader. (n.d.). Retrieved 20 June 2022, from <https://www.liveoakbank.com/veterinary-resources/roles-leader/>

Successful teamwork. (n.d.). Direction in Leadership and Diversity. Retrieved 20 June 2022, from <https://www.management-development.com/article/successful-teamwork/>

Tamim, H. (2019, November 2). Leadership is Amanah: Don't mix personal gain with the public interest. Utrujj. <https://www.utrujj.org/leadership-is-amanah-dont-mix-personal-gain-with-the-public-interest/>

The five leadership positions. (2017, April 4). The Jabian Journal. <https://journal.jabian.com/the-five-leadership-positions/>

Why is responsibility important in leadership? (2017, August 1). Nottingham Trent University Online. <https://online.ntu.ac.uk/online-student-experience/articles/what-is-responsible-leadership-and-why-is-im>

Utopia konsep kepemimpinan pasca reformasi Embrio despotisme dan dinasti politik

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.jawapos.com Internet Source	3%
2	pdfs.semanticscholar.org Internet Source	2%
3	www.ngopibareng.id Internet Source	2%
4	nasional.kompas.com Internet Source	2%
5	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
6	kaltimtoday.co Internet Source	1%
7	www.jisip.org Internet Source	1%
8	evaketiasih.wordpress.com Internet Source	1%
9	www.researchgate.net Internet Source	1%

10	id.wikipedia.org Internet Source	1 %
11	banten.indeksnews.com Internet Source	1 %
12	Anggun Rizki, Mahmudi Mahmudi. "Determinan Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2023 Publication	1 %
13	video.tribunnews.com Internet Source	1 %
14	www.kompas.com Internet Source	1 %
15	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	<1 %
16	www.kompas.tv Internet Source	<1 %
17	fcjp.ba Internet Source	<1 %
18	reporter.id Internet Source	<1 %
19	conference.asia.ac.id Internet Source	<1 %
20	journal.unika.ac.id Internet Source	<1 %

21 karyailmiah.unisba.ac.id
Internet Source

<1 %

22 pecihitam.org
Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On